

RENCANA KERJA (RENJA)



**BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara sistematis, terukur dan akuntabel dengan mengacu kepada prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan nasional serta kebutuhan dan tantangan aktual di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Melalui dokumen ini, Biro Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kapasitas aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, serta mendorong kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penyusunan dokumen.

Semoga laporan rencana kerja ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya	11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.1 Tujuan dan Sasaran.....	15
-----------------------------	----

BAB V PENUTUP	21
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Susunan kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan 11
Tabel 2.2	Susunan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin 11
Tabel 2.3	Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan... 12
Tabel 2.4	Susunan kepegawaian berdasarkan Agama 12
Tabel 2.5	Susunan kepegawaian berdasarkan Jabatan 13
Tabel 2.6	Susunan kepegawaian berdasarkan status kepegawaian 13
Tabel 2.7	Jumlah Aset Biro Hukum dan HAM 14
Tabel 3.1	Tujuan dan Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2024, Pagu Anggaran Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026 16

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), profesional, transparan dan akuntabel diperlukan perencanaan yang sistematis dan terukur sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Salah satu instrumen penting dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat arah kebijakan, prioritas Pembangunan, serta program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur staf yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM, memiliki peran strategis dalam memastikan tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan layanan bantuan hukum serta meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Tahun 2025 ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum dan HAM, serta berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan, dan arah kebijakan nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen Renja ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus sebagai dasar alokasi anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja Biro Hukum dan HAM. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai acuan

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama dalam penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum dan HAM;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan fungsi strategis Biro Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah.

Dengan memperhatikan dasar hukum tersebut serta kebutuhan akan perencanaan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, Renja Biro Hukum dan HAM ini disusun sebagai landasan arah kebijakan dan strategi biro dalam kurun waktu satu tahun, sekaligus sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan hukum dan HAM yang berkualitas, profesional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan operasional dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Hukum dan HAM. Renja ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan arah strategis organisasi guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Biro Hukum dan HAM Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arah kebijakan strategis dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang dapat diukur dan dilaksanakan secara efektif oleh Biro Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan hasil yang terukur;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM khususnya dalam penyusunan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa serta penyuluhan hukum dan HAM;
4. Mewujudkan sinergi dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek;
5. Menjadi pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja tahunan serta dasar penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Hukum dan HAM merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fungsi dan tugas Biro Hukum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan secara teknis uraian tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
2. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Visi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah ***“Profesional dalam pelayanan administratif dan pengkoordinasian bidang hukum dan hak asasi manusia yang terintegrasi dan terarah dalam rangka menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”***.

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilaksanakan oleh segenap

personil Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.
2. meningkatkan penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.
3. meningkatkan penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tugas pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.

Adapun tugas dan fungsi Biro Hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, sengketa hukum serta melakukan kegiatan ketatausahaan.

2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menelaah, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan/perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, menyiapkan bahan dokumentasi produk hukum daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

3. Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota

Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menelaah, memfasilitasi dan melakukan koordinasi perumusan/penyusunan Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya yang bersifat penetapan, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum dan HAM terdiri dari :

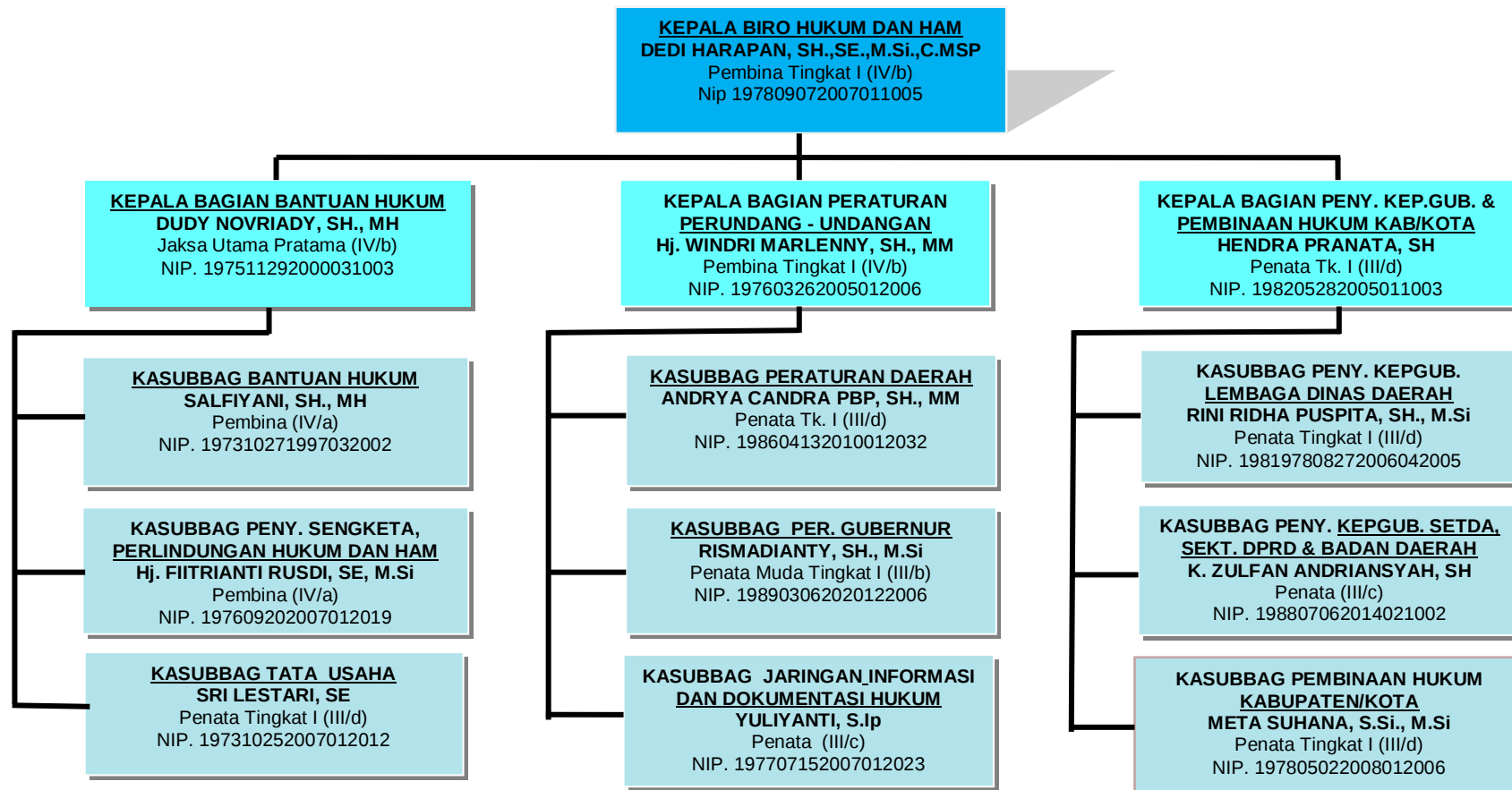
- a. Bagian Bantuan Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Bantuan Hukum;
 2. Subbagian Litigasi, Non Litigasi dan HAM; dan
 3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
 2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur; dan
 3. Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya.

c. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Dinas;
2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Badan, Biro, Sekretariat DPRD; dan
3. Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai (PNS) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Tingkat Jenis Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	05 Orang
2.	Golongan III	16 Orang
3.	Golongan II	01 Orang
Jumlah		22 Orang

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	18 Orang
2.	Perempuan	32 Orang
Jumlah		50 Orang

c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	10 Orang
2.	Strata 1	33 Orang
3.	Dipeloma III	03 Orang
4.	SLTA	04 Orang
Jumlah		50 Orang

d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	50 Orang
2.	Kristen	00 Orang
Jumlah		50 Orang

e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	01 Orang
2.	Eselon III	03 Orang
3.	Eselon IV	09 Orang
4.	Fungsional	00 Orang
Jumlah		13 Orang

f. Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berdasarkan Status Kepegawaian, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Susunan Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	PNS	24 Orang
3.	Honorer Database BKN	20 Orang
4.	Honorer Yang Tidak Masuk Database	06 Orang
5.	TKPD	01 Orang
6.	Outsourcing	01 Orang
Jumlah		50 Orang

g. Sarana dan Prasarana

Adapun aset yang ada pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per bulan Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Aset Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Aset	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	4 unit
2	Kendaraan Roda 2	7 unit
3	Komputer	33 unit
4	Printer	26 unit
5	AC	16 Unit
6	Kulkas	1 unit
7	TV	5 unit
8	Meja Rapat	1 unit
9	Brankas	1 unit
10	Kursi Sofa Putih Tamu	1 Set
11	Lemari Arsip	108 unit
12	Dispenser	3 unit
13	Mesin Tik Manual	3 unit
14	Whiteboard	1 Unit

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
2. Memperkuat pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian perkara guna memberikan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang terpadu;
4. Mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui program-program penyuluhan, pemantauan dan kerjasama lintas sektor;
5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu hukum dan HAM di Provinsi Sumatera Selatan.

3.1. Sasaran

Sasaran strategis dari Rencana Kerja Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah :

Berikut adalah sasaran utama yang mendukung tujuan di atas :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Realisasi Tahun 2024, Pagu Anggaran Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2026

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.729.000.000	1.558.831.925	90,16%	2.061.923.000		1.809.260.000		
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.480.000	97.690.000	78,48%	154.080.000		90.100.000		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.480.000	97.690.000	78,48%	154.080.000	1 Dok	90.100.000	1 Dokumen	100%
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.690.000	518.212.925	99,72%	285.000.000		457.860.000		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	34.967.900	99,91%	25.000.000	1 Paket	58.000.000	1 Paket	100%
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	484.690.000	483.245.025	99,70%	260.000.000	1 Paket	399.860.000	1 Paket	100%

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.051.830.000	910.109.000	86,53%	962.843.000		665.000.000		
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.051.830.000	910.109.000	86,53%	962.843.000	1 Laporan	665.000.000	1 Laporan	100%
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah	-	-	-	160.000.000		126.300.000		
5	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	100.000.000	4 orang	126.300.000		100%
6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	60.000.000	4 Orang	-	8 Orang	100%
7	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan	-	-	-	-	-	-	52 Orang	100%

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	33.000.000	32.820.000	99,45%	500.000.000		470.000.000		
8	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	300.000.000	2 Unit	170.000.000	4 Unit	100%
9	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33.000.000	32.820.000	99,45%	200.000.000	8 Unit	300.000.000	15 Unit	100%

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
B	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	1.591.364.000	1.569.897.772	98,65%	2.680.000.000		2.109.162.840		
VI	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	641.214.805	624.456.442	97,39%	1.090.000.000		661.766.544		
11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	217.015.210	216.094.199	99,58%	450.000.000	34 Dokumen	215.000.000	20 Dokumen	100%
12	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	70.000.000	66.085.281	94,41%	100.000.000	780 Dokumen	123.826.719	700 Dokumen	100%
13	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	95.000.000	92.305.719	97,16%	120.000.000	110 Dokumen	107.250.000	84 Buku	100%
14	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	259.199.595	249.971.243	96,44%	420.000.000	510 Dokumen	215.689.825	450 Dokumen	100%

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Pagu Anggaran Tahun 2025	Target Kinerja	Prakiraan Maju Tahun 2026	Target Kinerja	Target Keuangan
VII	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	950.149.195	945.441.330	99,50%	1.590.000.000		1.447.396.296		
15	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	868.149.195	863.733.665	99,49%	1.200.000.000	53 Kasus	1.336.300.496	8 Perkara, 20 Kasus	100%
16	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	82.000.000	81.707.665	99,64%	390.000.000	3 Laporan	111.095.800	3 Laporan	100%
Jumlah.....			3.320.364.000	3.128.729.697	94,23%	4.741.923.000		3.918.422.840		

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis hukum, adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang, diharapkan Biro Hukum dan HAM dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum yang profesional, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan HAM di lingkungan Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang berguna dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara optimal, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,**

**DEDI HARAPAN, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.1978090720070110**